Italia Mengapresiasi
Islam Moderat Di Indonesia

Demokrasi dan Islam moderat merupakan dua elemen identitas nasional baru Indonesia yang sudah mendapat pengakuan masyarakat internasional. Keduanya merupakan aset politik luar negeri Indonesia.

Citra Islam moderat ini semakin relevan bagi perjuangan Indonesia di dunia internasional bahwa kelompok radikal tidak mendapat dukungan mayoritas Muslim Indonesia sebagaimana ditunjukkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, dalam hal ini Direktorat Diplomasi Publik, sangat 'jeli' ketika mengangkat tema "domokrasi, Muslim moderat,dan kerukunan umat beragama" sebagai salah satu 'aset penting dalam politik luar negeri'. Terbukti 'citra positif Islam moderat' yang dikemas dalam Interfaith Dialogue ini mendapat apresiasi dan penghargaan dari berbagai negara.

Sepanjang tahun 2008, Diplomasi Publik, Deplu telah melakukan bilateral interfaith dialogue dengan Inggris, Austria, New Zealand, Belanda, Kanada, Lebanon dan Lainnya.

Memasuki tahun 2009, Kementerian luar negeri Italia, bekerjasama dengan Deplu serta didukung oleh Sant' Egidio, sayap NGO Vatikan melakukan konferensi interfaith Dialogue dengan tajuk "unity in Diversity : *the culture of coexistence in Indonesia*" .

Menlu RI, N. Hassan Wirajuda bersama Menlu Italia Franco Frattini telah membuka secara resmi konferensi dengan tema Unity in Diversity "*the culture of coexistence in Indonesia*". Konferensi yang diselenggarakan oleh Kemlu Italia dan Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Communità di Sant' Egidio,* diselenggarakan di Roma pada 4 Maret 2009.

Dalam sambutan pembukaan Menlu sangat mengapresiasi diselenggarakannya konferensi ini. Dimana Indonesia dijadikan sebagai model dari hubungan ideal antar umat agama. Hal serupa juga disampaikan oleh Menlu Italia yang menganggap perlunya masyarakat global belajar dari toleransi di Indonesia.

Pembicara dalam konferensi ini diantaranya Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, Prof. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Siti Musdah Mulia dan Romo Martinus Situmorang, Ketua Kanferensi Wali Gereja Indonesia.

Prof. Andrea Ricardi, Pendiri komunitas Sant' Egidio dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia merupakan laboratorium kemajemukan (pluralisme), dimana disitu terjadi hidup berdampingan secara damai antara penganut agama dan kebudayaan yang berbeda-beda. Dunia memerlukan peradaban mengenai hidup berdampingan secara damai (civilization of coexistence) di masa depan dan Indonesia dapat dijadikan sebagai model.

Indonesia dan Italia memiliki kesamaan sebagai masyarakat yang sama-sama mayoritas. Indonesia Mayoritas Muslim dan Italia mayoritas katolik. Akan tetapi keduanya memiliki problem yang sama yaitu kemajemukan. Forum ini adalah forum untuk saling belajar dan berbagi pengalaman.

"Dewasa ini Indonesia telah menjadi Negara demokrasi terbesar di dunia, hal ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring. Prinsip-prinsip universal demokrasi seperti partisipasi rakyat, pemajuan dan perlindungan HAM, penegakan hukum, kebebasan berekspresi semua sejalan dengan ajaran Islam. Saya percaya bahwa demokrasi memberi ruang perbedaan dan karenanya dapat memajukan toleransi dan dialog", demikian disampaikan oleh Hasyim Muzadi.

Indonesia punya peran di dunia Islam, sebagai pintu masuk mengenalkan demokrasi dan HAM. Dan Italia merupakan pintu gerbang Eropa. Roma merupakan pusat Katolik. Indonesia merupakan wajah lain dari Islam. sedangkan italia merupakan wajah lain dari Dunia Barat. Konferensi ini menjadi jembatan bagi Indonesia dan Italia untuk menjembatani berbagai isu-isu global yang selama ini melibatkan agama sebagai isu sensitif.

Konferensi ini juga dimaksudkan untuk membangun dialog tingkat tinggi antara wakil-wakil organisasi Islam di Indonesia dengan para pakar dari Italia untuk saling mengenal dan meningkatkan pemahaman mengenai model Islam di Indonesia. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik tentang Indonesia, kedua negara dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. (KaEM)

Islam Indonesia Menjadi Elemen Penting

Dunia kontemporer, dari tahun 90-an, ditandai dengan berbagai konflik. Pertikaian antara Islam dan dunia Barat adalah salah satu konflik yang kemudian memunculkan terorisme model ala Bin Laden. Perbedaan agama, etnik dan peradaban telah menimbulkan gesekan dan konflik yang cukup serius diberbagai belahan dunia.

Globalisasi telah membawa dan mengafirmasi identitasnya masing-masing didepan horizon dunia yang secara mendadak terbentang. Demikian juga bagi para agama, peradaban, etnik, mereka ini memegang peranan penting dalam memberikan identitas yang berbeda. Angin dingin dan angin keras dari globalisasi tidak dapat dihadapi dengan tubuh telanjang, untuk itu diperlukan pakaian sebagai pelindung. Seringkali pakaian identitas tersebut merupakan suatu baja pelindung.

Dalam era globaliasi, rakyat, komunitas agama dan individu) merasa kehilangan identitas dirinya sehingga merasa perlu membentengi identitasnya. Kata Todorov, manusia, kontemporer merasa kehilangan identitas dirinya dalam dunia yang menjadi terlalu luas baginya. Tapi tidak ada satupun yang dapat hidup tanpa identitas untuk waktu yang terlalu lama. Untuk mendapatkan perlindungan maka terkadang diambillah identitas lain yang walaupun tidak sesuai dengan dirinya.

Krisis ekonomi baru-baru ini telah membuat kehilangan arah bagi mereka yang agresif; tapi kemanakah agresifitas tersebut? siapa penanggungjawab terjadinya krisis tidak diketahui. Karena bukan berbentuk suatu gedung kekuasaan yang dapat dirobohkan. Bahkan tersembunyi dibelakang kabut pusaran global. Resikonya adalah kalau agresifitas tersebut membabi buta menyerang tetangganya yang berbeda dengan identitas dirinya. Kemarahan karena keadaaan ekonomi yang menyedihkan dapat membawa pada serangkaian gerakan perlawanan. Seperti yang terjadi setelah krisis 1992 timbul gerakan agresifitas seperti anti Yahudi di Eropa.

Saya percaya bahwa dunia yang akan datang tidak akan mempunyai hanya satu warna tunggal peradaban atau satu agama saja. Demikian juga globalisasi, walaupun menancap kuat dalam kultur dunia Barat, tidak akan dapat memaksakan bentuk peradaban tertentu. Pertikaian peradaban adalah bagaikan dunia barbarian. Hal ini dapat kita lihat dibeberapa bagian dunia, dimana hak-hak dari minoritas dilanggar atau dianiaya hanya karena berbeda dari mereka. Eropa belajar dari pengalaman mereka bagaimana kebencian kepada Yahudi ketika perang dunia kedua telah membawa benua ini hampir tenggelam dalam kegelapan.

Masa depan bukanlah peradaban tunggal ataupun konflik antar peradaban, tapi peradaban untuk hidup bersama antar manusia yang berbeda. Peradaban untuk hidup bersama.

Hidup bersama adalah merupakan suatu kebutuhan pada setiap level baik dari kehidupan intern disuatu negara hingga ke tingkat internasional yang bertambah multipolar, negara yang paling kuat pun tidak akan dapat menghadapi semua tantangan sendirian.

Indonesia adalah suatu negara penting dalam berbagai aspeknya, bagi ekologinya di dunia. Walaupun banyak rakyatnya dan beberapa daerahnya sangat padat penduduknya, Indonesia masih mempunyai daerah luas yang belum dihuni dan masih alami. Indonesia merupakan negara kedua dengan keanekaragaman biodiversity (yang pertama adalah Brazil), dengan 60% teritorinya terdiri dari hutan dan memiliki tingkat endemism kedua tertinggi setelah Australia. Tapi negara ini bukan hanya mempunyai ekologi yang besar, tapi juga memiliki sumber penting bagi ekologi spiritual dan politik kontemporer. Memiliki sejarah ko-eksistensi dari berbagai etnis, suku dan agama yang beragam.

Meski mayoritas beragama Islam tetapi Indonesia bukan negara Islam. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia yaitu 190 juta muslim atau sebanding dengan jumlah muslim diseluruh semenanjung Arab secara keseluruhan. Agama Islam di Indonesia dijalankan seiring dengan dinamika kebudayaan lokal yang beragam untuk itu maka terdapat banyak aliran. Sejarah Islam disini sangat menarik yang membuatnya berbeda dengan Dunia Arab. Agama Islam di kepulauan Indonesia disebarkan bukan melalui peperangan namun dengan cara damai.

Sering kita di dunia Barat mengintepretasikan dimana-mana agama Islam itu sama dan dipeluk oleh satu milyar orang di dunia. Islam adalah suatu dunia yang komplek dan plural. Salah satu komponen penting adalah Islam Indonesia yang kurang mendapat perhatian dari Islam lainnya di dunia Arab. Bahkan Islam Indonesia akan menjadi penting dimasa yang akan datang.

Dua organisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menunjukkan kekuatan riil dan betapa spesifiknya Islam di negera tersebut. Dua organisasi ini suaranya belum banyak dikenal oleh Islam di dunia. Indonesia merupakan suatu laboratorium besar dan luas dimana terdapat ko-eksistensi antara demokrasi, Islam dan modernitas. Di Indonesia dapat kita saksikan toleransi keagamaan bagi pemeluk Kristen.

Indonesia juga merupakan laboratorium karena 28,4% rakyatnya berada dibawah 15 tahun. Usia kemerdekaannya kurang lebih baru 60 tahun, demokrasi baru dijalankan selama 10 tahun. Untuk aspek inilah kami tertarik dan respek pada Indonesia karena meskipun banyak menghadapi kesulitan, tetapi terwujud suatu laboratorium peradaban hidup bersama. Tentunya disini bukan merupakan surga, juga karena pluralitas situasinya memaksa para pemimpinnya untuk mengambil langkah mediasi yang komplek. Tapi Indonesia menunjukkan bahwa hidup bersama antar rakyat dari etnik yang berbeda dan agama yang berbeda bukanlah suatu neraka, dan perbedaan tidak harus membawa pada perselisihan, bahkan merupakan suatu kesempatan.[]

Prof. Andrea Riccardi
Pendiri Sant Egidio

"Meski mayoritas beragama Islam tetapi Indonesia bukan negara Islam. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia yaitu 190 juta muslim atau sebanding dengan jumlah muslim diseluruh semenanjung Arab secara keseluruhan. Agama Islam di Indonesia dijalankan seiring dengan dinamika kebudayaan lokal yang beragam untuk itu maka terdapat banyak aliran. Sejarah Islam disini sangat menarik yang membuatnya berbeda dengan Dunia Arab. Agama Islam di kepulauan Indonesia disebarkan bukan melalui peperangan namun dengan cara damai."

Konferensi Interfaith Dialogue di Italia

Indonesia Menjadi Model Ko-eksistensi Lintas Agama

Indonesia memang sedang menjadi model untuk kehidupan multi agama dalam ko-eksistensi, pro-eksistensi, dan multi-eksistensi lintas agama. Dan titik sentral dari harmoni itu adalah moderasi, bukan fundamentalisasi ataupun liberalisasi. Karena fundamentalisasi mengakibatkan orang beragama secara egois dan lebih melihat orang lain sebagai musuh, sehingga melahirkan kerawanan didalam konflik. Liberalisasi di bidang agama sebenarnya juga merugikan semua agama, karena paling tidak akan mereduksi beberapa sektor theologi dan ritual masing-masing agama.

Yang kita inginkan dari konferensi di Roma ini adalah keserasian dari ko-eksistensi, multi-eksistensi dan kalau perlu pro-eksistensi, karena inilah yang sehat. Jadi masing-masing agama tidak perlu takut dirugikan atau diserang, dan satu-satunya modal untuk itu adalah moderasi, yaitu keseimbangan antara keyakinan dan toleransi, antara *faith* dan toleransi, dimana ini dibawakan dalam model domestik Indonesia.

Kalaupun belakangan ini ada beberapa konflik di Indonesia, itu sebetulnya bukan watak asli dari bangsa Indonesia, karena konflik itu terjadi baru pada sepuluh tahun belakangan ini. Kalau itu merupakan watak bangsa ini, maka tentunya konflik tersebut sudah terjadi berabad-abad sebelumnya. Artinya ada faktor-faktor baru yang membuat terjadinya konflik-konflik itu. Itu adalah konflik global antara Barat dengan dunia Islam yang berada di Timur Tengah, dan konflik tersebut akhirnya merembet ke Indonesia sebagai negara yang paling besar jumlah penduduk Islamnya.

Sehingga dengan demikian Indonesia itu bukan *centrum of terrorism*, tetapi adalah *the fictim of terrorism*, karena adanya *strech out* dari Timur Tengah. Dengan demikian kalau Indonesia ingin kembali tenang, maka kita harus kembali kepada pemikiran domestik Indonesia, sehingga dengan demikian persoalannya menjadi selesai. Karena selain memiliki konsep lintas agama, Indonesia juga memiliki konsep hubungan antara agama dan negara yang sifatnya substantif dan bukan formalistik.

KH. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU)

Jadi apabila substansi dari masing-masing nilai agama itu terakomodasi, maka dia bisa menjadi payung bagi seluruh agama. Karena kalau kita berbicara mengenai substansi agama, bisa dikatakan bahwa hampir sebagian besar atau sekitar 80 % adalah mengenai humanitas, maka yang berbeda hanya formulasinya saja.

Secara kebijakan, formulasi ini hendaknya dilakukan hubungan antara agama dan negara. Misalnya bahwa semua agama itu anti korupsi, ingin bersatu, dan ingin kemakmuran tanpa perlu di stempel bahwa itu adalah kemakmuran Islam, kemakmuran Kristen, dan sebagainya. Karena formulasi-formulasi itu menjadi tidak diperlukan ketika ada titik-tititk persamaan lintas agama.

Tentunya masing-masing agama itu memiliki perbedaan, karena dari namanya saja sudah berbeda, namun tentunya juga ada persamaan. Yang berbeda adalah theologi ritual dan strategi tentang pengembangan, tetapi bahwa masalah kemanusiaan harus diangkat, semua agama dalam hal ini sama.

Maka garis moderasi ini adalah bagaimana agar yang berbeda itu biarlah berbeda dalam ko-eksistensi, tetapi yang sama jangan dibedakan dan yang berbeda tidak usah dipaksakan untuk menjadi sama.

Mozaik seperti ini sebenarnya adalah yang paling bagus, apalagi masalahnya sekarang konflik-konflik yang ada di dunia ini belum tentu konflik agama, dimana dalam hal ini orang harus menyadari hal tersebut. Yang benar-benar konflik agama itu saya kira paling hanya sekitar 30% diseluruh dunia ini. Yang 70% adalah konflik yang kelihatannya adalah konflik antar agama, padahal sebetulnya itu adalah konflik-konflik karena faktor non agama tetapi kemudian di agamakan.

Misalnya karena faktor politik, ekonomi, minyak, hegemoni, perebutan teritorial dan sebagainya yang kemudian mengusik masyarakat beragama. Ketika terjadi konflik, maka di-isu-kanlah bahwa itu konflik agama, padahal itu adalah konflik non agama yang diagamakan. Seperti juga di negara kita, konflik antara Islam dan Kristen di Maluku itu sebenarnya konflik separatisme, karena berabad-abad sebelumnya konflik itu tidak pernah ada.

Seperti juga misalnya konflik bom di Bali, itu bukan murni masalah agama, tetapi adalah merupakan tindak pembalasan orang-orang yang disakiti oleh Amerika dan mereka melakukannya dari Bali. Faktor-faktor ini hendaknya juga dilihat tidak hanya sebagai faktor agama, tetapi faktor non agama yang kemudian diagamakan.

Didalam pertemuan di Roma ini kita mencoba untuk memilah-milah, dan saya sudah sampaikan bahwa yang bisa menyelamatkan hal ini adalah moderasi, bukan fundamentalisasi ataupun liberalisasi.

Yang perlu kita tindak lanjuti dari pertemuan di Roma ini adalah konsekuensi dari kesimpulan-kesimpulan. Seperti Indonesia yang mayoritas Islam, dia harus membuktikan bahwa dia melindungi minoritas Kristen, Budha dan sebagainya. Demikian juga dengan Thailand yang mayoritas Budha, dia harus melindungi minoritas Islam. Juga antara Kristen dengan Katolik misalnya, dia harus membuktikan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah konflik-konflik di Irlandia Utara.

Jadi menurut saya kesepakatan

ini sudah bagus dan *on the right track*, masalahnya sekarang bagaimana implementasinya, karena dalam hal ini orang harus bisa mendahulukan kebenaran daripada kepentingan. Tetapi saya optimis, karena agama-agama besar di dunia sekarang ini sudah sadar, bahwa selain konflik mereka juga dikonflikkan orang.

Kesadaran ini penting, sebab selama ini politisi, ekonom, hegemoni dan sebagainya yang mengkonflikkan umat beragama, setelah timbul konflik dia melemparkan kesalahan itu kepada nilai-nilai agama, padahal sebenarnya itu bukan faktor agama.

Di Indonesia, dalam prakteknya sebenarnya pemerintah tinggal memelihara apa yang ada dan menjaga supaya unsur-unsur yang tidak Indonesiawi itu jangan berkuasa atau merebak. Unsur-unsur yang non Indonesiawi ini bisa saja melalui agama, dalam arti bukan melalui agama sebagai ajaran, tetapi melalui agama sebagai gerakan, terutama di era reformasi ini.

Contohnya misalnya pada dua tahun lalu saya mengunjungi WCC, yaitu suatu *assembly* terbesar untuk umat Kristen, di Papua. Sebagian dari delegasi Papua meminta supaya *assembly* itu mengambil keputusan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia, itu kan salah, bagaimana agama kemudian dicampur-adukkan dengan masalah-masalah seperti ini. Tetapi karena agama-agama besar didunia sudah mulai sadar bahwa intervensi politik itu mengganggu agama, maka hal itu tidak bisa diterima. Bahkan di *assembly* itu sudah diputuskan bahwa seluruh gerakan umat agama harus mewaspadai masalah-masalah yang non agama yang kemudian diagamakan itu.

Untuk itu pemerintah Indonesia harus mewaspadai anasir-anasir yang masuk ke Indonesia ini. Susahnya adalah karena sekarang ini politik Indonesia sedang liberal, sehingga *border* itu menjadi *borderless*, baik dalam artian teritori maupun ideologi negara. Oleh karenanya pemerintah harus tegas dan berani, bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi Indonesia, dan semua harus berjalan pada prospek negara proklamasi.

Jangan karena masuknya berbagai macam angin dari kiri dan kanan, kemudian menempatkan Indonesia sebagai bagian dari negara lain di bidang gerakan ini, baik itu dari Barat maupun Timur Tengah. Jadi bagaimana pemerintah bisa mempertahankan gerakan-gerakan yang Indonesiawi dengan baik.

Sebenarnya mereka bicara syariat itu hanya karena eforia saja, sebab yang dimaksud dengan syariat adalah larangan judi, pelacuran, narkoba dan sebagainya yang sebenarnya di KUHP juga sudah ada, jadi mengapa harus dikatakan bahwa ini syariat. Diperketat saja pelaksanaan dari KUHP itu, karena dengan nama syariat itu orang-orang terperanjat bahwa seakan-akan yang tidak Islam itu tidak inklusif disitu, padahal materi yang diperjuangkan adalah materi itu-itu juga.

Inilah yang saya maksud bahwa kita umat Islam itu sendiri juga harus lebih bagus dalam menggunakan substansi agama daripada menggunakan formulasi agama. Karena syariat yang dimaksudkan itu, semua sudah ada di hukum Indonesia, kalau tambahan misalnya seorang walikota harus bisa baca Qur'an dan sebagainya, itu tidak usah diformalkan. Karena kalau kita mayoritas, tinggal kita pilih saja walikota yang bisa baca Qur'an, cukup begitu saja dan tidak harus dilakukan sebuah formulasi yang membuat eksklusifisme pada sebuah ajaran agama.

Tapi saya kira hal ini tidak akan berjalan lama, apalagi karena ini akan disaring oleh Menteri Dalam Negeri, jadi hal itu tidak usah terlalu dipusingkan. Yang perlu diwaspadai itu adalah fundamentalisasi yang kemudian menjadi rawan konflik, dan liberalisasi yang kemudian merusak seluruh agama.

Eropa terkena liberalisasi pada abad ke-18, dimana sebenarnya hubungan antara agama dengan negara sudah pasif sekali, kecuali di tempat-tempat tertentu seperti Roma. Tetapi kalau kita ke Denmark, Austria, atau Norwegia, disana ada UU perkawinan yang membolehkan perkawinan sesama jenis, padahal hal itu tidak ada didalam ajaran Kristen yang manapun. Artinya bahwa liberalisasi itu jangan dikira hanya akan mereduksi kepada Islam, tetapi juga kepada seluruh negara, karena hal itu sesungguhnya merupakan bagian dari sekularisasi.

Masalahnya sekarang bahwa ruang gerak pemerintah itu dipersempit disebabkan karena liberalisasi perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen. Jadi pemerintah tidak lagi mendominasi itu semua. Pemerintah maunya "A" tetapi kalau undang-undangnya bilang "B" bagaimana, sementara UU itu dibuat oleh parlemen yang *out of control* dari pemerintah, dan malahan partai-partai yang mengambil akses di eksekutif, jadi sudah punya fraksi tapi masih minta jabatan menteri.

Masalah-masalah ini harus diperbaiki secara sistemik, pemerintah harus melakukan upaya agar sistem ini menjadi rapih, tetapi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian karena parlemen sekarang ini banyak *outside* dari pemerintah, meskipun dalam beberapa hal juga berbarengan. Dengan demikian faktor politik menjadi penting disini, sementara partai-partai politik yang ada sekarang tidak memiliki standarisasi untuk melakukan pengkaderan baik dalam bidang politik maupun kenegarawanan. Jadi disinilah saya melihat bahwa sistem yang sedang kita pakai itu di beberapa segi harus kita rapihkan untuk menjaga substansi kerukunan dan kebangsaan.[]

Kekaguman Atas Ko-eksistensi Di Indonesia Bukan Basa-Basi

Martinus D. Situmorang
Ketua Konferens Wali Gereja (KWI)

Atmosfer konferensi Interfaith Dialogue mengenai Ko-eksistensi di Indonesia bernuansa sangat positif, penuh kekaguman dan penghargaan atas realitas ko-eksistensi dan ko-habitasi damai antar umat beragama di Indonesia, bahkan istilah yang mengemuka, Indonesia menjadi suatu eksperimen dan juga *example* yang lengkap dari kehidupan bersama yang penuh damai.

Hal ini sekaligus juga merupakan peneguhan, bahwa harta kekayaan yang sangat dinamis ini adalah harta yang mesti dipelihara dan sekaligus dibagikan ke bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu dikatakan juga bahwa Indonesia menjadi model, dan pola yang mengilhami dan mendorong serta secara bersamaan juga menghimbau untuk waspada, jangan terlena dengan eforia positifnya pandangan itu.

Sebab persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan agama juga bisa menjadi penyebab dari konflik-konflik. Contohnya katakanlah kecemburuan sosial di berbagai strata sosial, itu bisa menjadi alasan terjadinya konflik antar etnis yang kemudian bisa berlanjut ke antar denominasi keagamaan, itu yang perlu kita wapadai.

Dengan keyakinan dasar bahwa kehidupan antar umat beragama adalah kesatuan dalam keragaman yang merupakan anugerah pemberian Tuhan dan sekaligus juga adalah buah dari kebijakan kebijaksanaan masyarakat dan bangsa kita yang perlu dikelola dengan bangga, tetapi juga harus dengan kewaspadaan yang tinggi dan tanpa menjadi takut.

Sejauh saya mengenal orang-orang dan menangkap nuansa perbahasaan mereka, yang disampaikan oleh Menlu Italia dan yang lain-lainnya itu bukanlah basa-basi, berdasarkan perhitungan matematispun adalah benar bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam yang mutlak mayoritas jauh lebih banyak dari seluruh umat Islam di Timur Tengah atau paling tidak berimbang.

Dan ternyata di Indonesia tidak ada kekerasan yang disebabkan karena keyakinan keagamaan, tidak ada persekusi untuk kelompok agama manapun, dan secara mendasar ada kebebasan. Itu yang mereka lihat, dan oleh sebab itulah istilah-istilah yang digunakan, kalimat-kalimat yang disampaikan, dan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan, menurut saya adalah outentik, asli bukan basa-basi ataupun bahasa diplomatik.

Tentu saja, apa pun kata orang kita sendiri harus yakin dengan apa yang kita miliki, karena kalau tidak kita tidak punya basis dan akan goyah. Saya pribadi sebagai warga negara Indonesia dan sebagai orang beragama dan pemimpin agama Katolik, dihadapan Tuhan saya mengatakan dengan jujur bahwa saya bersyukur atas keadaan di negara kita, dengan apa yang ada ditengah bangsa kita.

Kepada umat Katolik saya katakan bahwa kita harus bersyukur, dimana harusnya itu bukan keharusan legal ataupun keharusan karena dipaksa dari luar, tetapi karena kesadaran, melihat dengan jernih nilai-nilai positif dalam kehidupan kita bersama, dengan keragaman etnis, budaya, dan agama.

Kita perlu waspada karena perkembangan sosial politik dan dinamika kehidupan ekonomi bisa menyebabkan katakanlah berkurangnnya kepekaan orang, kelompok atau kalangan tertentu terhadap realitas keragaman ini. Bisa juga hal-hal yang tidak ada kaitan dengan keagamaan lalu dikaitkan dengan keagamaan, entah dengan motivasi politis atau ekonomis yang dilakukan oleh katakanlah pemuka agama pada tingkat tertentu, dalam upaya untuk menarik simpati, menarik pengikut atau untuk tujuan politik.

Saya bisa mengerti bahwa memimpin negara yang besar dengan wilayah yang luas, varietas etnis, budaya dan agama yang begitu besar, tingkat perkembangan ekonomi, demokrasi, dan *security*, saya rasa tidak satu pemerintahpun yang akan dengan serta merta secara sempurna dapat menerapkan hukum secara sempurna.

Sebetulnya kalau bangsa kita benar-benar ingin tetap menjadi dan menghargai diri sebagai bangsa yang sangat toleran dan damai dengan kekeluargaan yang sangat tinggi, saya rasa justeru kelompok-kelompok minoritas harus sangat dilindungi, itulah tanda dari suatu bangsa yang dewasa, dan saya rasa kita sedang bergerak ke situ.

Memang ada sentimen yang muncul di lingkungan orang-orang non Muslim pada tahun-tahun terakhir ini, misalnya dikatakan Kristen menjadi *liability* atau faktor negatif, itu karena ada yang membesar-besarkan. Itu sebetulnya harus diperhatikan sejauh mana kebenarannya dan bagaimana hal itu harus diatasi.

Kedua, dalam perdebatan publik tentang perundang-undangan kita, tokoh-tokoh yang saya kagumi dan hargai dan saya yakin juga memiliki integritas moral dan kebangsaan yang tinggi seperti pak Hasyim Muzadi, mengatakan bahwa "hukum yang diilhami dari nilai-nilai kemanusiaan yang datang dari ajaran Islam tentulah mesti diperjuangkan. Tetapi konotasi dan penamaan juga penting kalau ingin memasukkan syariah Islam di perundang-undangan nasional dan peraturan-peraturan daerah, karena bisa merusak kebersamaan kita dan kemurnian Islam".

Negara kita adalah negara yang sangat kekeluargaan, kendatipun demikian bangsa kita juga tergerus oleh modernisme, post modernisme, materialisme, dan individualisme. Hal itu merasuk di tengah masyarakat kita, sehingga dari hari ke hari jumlah kekerasan yang tidak masuk akal secara manusiawi terjadi di lingkungan kita. Memang saya rasa ini menjadi tugas kita sebagai umat beragama, dimana peran para pemuka agama menjadi makin penting. Namun demikian kita tidak boleh lagi legalistik, tidak bisa lagi mengatakan dan berseru bahwa ini moralitas, tetapi kita juga harus melihat sisi integrasi, interaksi dan simbiosa yang harus ditemukan antara iman dan realitas, kalau ini tetap dibiarkan terpisah begitu, lalu apa artinya agama.

Nilai-nilai moderasi keberagaman kita saya rasa tidak boleh disamakan dengan laksisme, dan indeferentif terhadap nilai keagamaan. Sebab menurut keyakinan saya pribadi, kalau kita pergi berjiarah jauh kedalam nilai sejati dan terdalam dari agama-agama, hal-hal itu tadi bukan hanya harus diyakini secara rasional kognitif, tetapi juga harus menjadi penghayatan, karena itulah yang sebetulnya justru akan membenarkan bahwa kita memang masyarakat moderasi.

Hal seperti itulah yang menurut saya juga harus diwujudkan secara kompleks, karena sebetulnya agama itu harus terintegrasi dalam kehidupan dan dialog antar umat beragama. Ko-habitasi ini harus ada dalam proyek-proyek yang tidak hanya dirancang oleh para elit tetapi juga oleh *grass root*.[]

Membangun Citra Islam Di Gerbang Vatikan

Siti Musdah Mulia
Chairperson Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

Siti Musdah Mulia
Chairperson Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

Saya fikir adalah suatu hal yang sangat positif bahwa pemerintah dan masyarakat Italia yang mayoritas Katolik menyadari perlunya sebuah upaya untuk membangun relationship antara Indonesia-Italia, yang dua-duanya itu adalah mayoritas. Indonesia mayoritas Islam dan Italia mayoritas Katolik, tetapi keduanya mempunyai problem yang sama, yaitu heterogeneity.

Oleh karena itu maka keduanya harus belajar, jadi sebetulnya forum ini adalah untuk kita saling belajar, bagaimana Italia memanage kelompok-kelompok lain yang bukan Katolik. Indonesia juga sebetulnya harus belajar lebih baik lagi, yaitu bahwa tidak bisa membangun suatu politik yang menyeragamkan semua kelompok, karena pada kenyataannya Islam di Indonesia itu berkelompok-kelompok, apalagi yang non Muslim.

Jadi menurut saya, pertama ini adalah sebuah *heritage* yang kita dapatkan dari para *the founding father* kita, bahwa Pancasila yang mengikat semua perbedaan kita itu, menjadi sebuah kekayaan yang harus kita pelihara dan pertahankan untuk tujuan masa depan bangsa kita.

Yang kedua, saya kira kita juga harus belajar bahwa di Italia ini ada satu komunitas yang disebut komunitas Sant' Edigio yang sebetulnya adalah suatu organisasi non pemerintah yang begitu aktif melakukan upaya-upaya *interfaith dialogue* dan juga upaya-upaya kemanusiaan untuk membela sesama tanpa melihat agama, suku bangsa dan warna kulit. Saya mengenal Sant' Edigio ini sudah cukup lama, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu dimana saya sudah aktif diundang setiap kali mereka melakukan *international meeting*.

Yang menarik adalah bahwa anggota mereka itu bukan hanya Katolik, melainkan mencakup banyak agama yang berada di seluruh dunia. Oleh karena itu, setiap kali pertemuan saya bisa bertemu dengan kelompok-kelompok Muslim dari Pakistan, Aljazair, Mesir, Maroko dan lain-lainnya, dan saya merasa sepertinya organisasi seperti ini perlu lebih diperbanyak di Indonesia. Karena kita melihat ada banyak organisasi agama di Indonesia, tetapi organisasi agama yang mencakup banyak kelompok itu belum ada.

Karena itu Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencoba untuk menjadi suatu organisasi yang menghimpun semua agama dan kepercayaan, bahkan kepercayaan kepercayaan yang tidak diakui secara resmi di negara kita. Sebab negara kita ini aneh, karena masih menganut kebijakan bahwa ada yang boleh dan yang tidak boleh. Seharusnya semua kelompok yang mempunyai kepercayaan apapun mestinya harus diapresiasi, sepanjang mereka tidak melakukan kekerasan didalam melakukan aktifitasnya.

Jadi ada dua point yang saya lihat, yaitu bahwa ditingkat pemerintah dan ditingkat masyarakat semuanya sangat aktif membangun demokrasi melalui upaya-upaya dialog dan *peace education*. Saya melihat bahwa dialog-dialog yang selama ini masih dalam tingkat wacana itu harus di format dalam bentuk dialog kehidupan dan kerjasama-kerjasama yang kongkrit.

Pemerintah mungkin bisa membuat semacam perjanjian bilateral tentang pendidikan, tukar menukar teman-teman Islam untuk datang ke Vatikan untuk belajar bahwa Katolik itu sebenarnya seperti apa. Sebaliknya orang-orang Katolik yang berada di Vatikan ini bisa datang ke Indonesia untuk belajar bahwa Islam itu bagaimana sebenarnya. Dengan demikian *prejudice* diantara keduanya itu bisa sedikit menghilang, dimana mungkin *image* bahwa Islam itu keras dan identik dengan terorisme itu terkadang menyakitkan, padahal paling hanya seberapa banyak umat Islam yang setuju dengan terorisme itu, tetapi label yang begitu jelek direkatkan kepada Islam.

Itu juga penting untuk di eliminasi, karena kalau hanya kita yang memperbaiki diri sedangkan mereka tidak mau memperbaiki *image* mereka tentang Islam, itu juga menjadi problem. Jadi itu mungkin bisa dimulai dari tingkat bilateral pemerintah ada semacam pertukaran pendidikan, lalu ditingkat masyarakat ada kerja-kerja kemanusiaan dalam bentuk kelompok-kelompok guna melakukan kegiatan *peace education*. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan dan bantuan saat ada semacam bencana alam dan lain-lainnya.

Kita bekerja bersama dalam satu bendera, jadi tidak ada friksi-friksi. BJadi menurut saya semua kecurigaan itu bisa dieliminated melalui kerja-kerja kongkrit semacam itu.

Ekstrim Minoritas

Munculnya kelompok kelompok minoritas itu menurut saya disebabkan oleh tiga hal, pertama yang saya sebut dengan *global power*, yaitu sikap tidak adil dari kelompok negara adi power seperti AS dan kawan-kawannnya, yang selama ini selalu membuat kebijakan yang timpang terhadap dunia Islam, akibatnya muncul kebencian di kalangan seperti ini, karena mereka tidak faham sepenuhnya, mereka fikir AS itu identik dengan *human right* dan demokrasi, padahal tidak.

Bahwa itu hanya kebijakan sepihak dari pemerintah AS, seperti ketika rejimnya Bush, itu tentu seluruh rakyat AS setuju dengan Bush, karena di negaranya sendiri Bush juga sering didemo oleh rakyatnya.

Yang kedua adalah karena sekarang ini kita sedang membuka forum demokrasi, dan itu artinya bahwa semua kelompok punya kesempatan untuk mengekspresikan pikirannya. Memang demokrasi itu seperti orang membuka jendela, jadi bukan hanya udara segar yang masuk tetapi juga ada virus dan lain sebaginya, sementara disisi lain hukum kita belum siap dan belum stabil sistemnya.

Kelompok-kelompok ini kemudian menggunakan era reformasi ini sebagai kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka yang tidak demokratis, itu anehnya. Yang ketiga adalah bahwa pemerintah kita yang selalu dianggap sekuler itu ternyata tidak mampu untuk membawa masyarakat kita menjadi sejahtera, lalu mereka mengatakan bahwa selama pemerintah kita masih menganut ideologi sekuler Pancasila, maka Indonesia tidak akan menjadi baik, itu yang selalu mereka katakan.

Kelompok-kelompok itu dan terutama kelompok yang trans-nasional, kemudian mengadopsi bahwa Islam adalah jawabannya, bahwa itu adalah problem kemasyarakatan dan oleh karena itu Islam adalah jawaban dari semua pertanyaan, dan semua masalah. Mereka tidak berfikir bahwa di negara-negara yang menganut sistim negara Islam seperti Pakistan, Sudan dan lain-lainnya itu juga mempunyai problem yang sama. Jadi sebetulnya bukan soal Islamnya, tetapi bagaimana seharusnya sistem yang me*manage* masyarakat itu harus diperbaiki.[]

Menlu RI menghadiri resepsi penyambutan yang diselenggarakan oleh Komunitas Sant Egidio. Pendiri Sant' Agidio, Prof. Andrea Riccardi (kedua dari kiri) tampak berbicang hangat dengan Menlu RI.

Penandatanganan Grant Agreement antara Indonesia-Jepang dilakukan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika TM. Hamzah Thayeb dan Duta Besar Jepang di Jakarta Kojiro SHIOJIRI pada tanggal 13 Maret 2009 di Ruang Nusantara Departemen Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta.

Y. M. Presiden Kroasia Stjepan Mesic (kedua dari Kanan) melakukan kunjungan singkat ke Paviliun KBRI di Sajam Gast Internasional Fair . Presiden Stjepan Mesic juga menyempatkan diri mencicipi kopi Gayo Aceh di stand KBRI dan mie instant rasa kari ayam yang disuguhkan oleh Indofood.

Selain melakukan penandatangan kerjasama bilateral, pada hari kedua kunjungan Menlu RI di Italia, juga melakukan breakfast meeting dengan para investor, tokoh berpengaruh dan friends of Indonesia di Aldrovandi Palace, Roma (5/3).

KBRI Moskow menggelar fragmen tari Kresna Duta di panggung terbaik Dom Musiky, Moskow Rusia, Selasa malam (10/3). Di bawah guyuran salju terakhir musim dingin, sebanyak 564 pengunjung tak beringsut dari tempat duduknya. Apresiasi spontan terus berlangsung tanpa komando sepanjang pertunjukan. "Perpaduan gerakan lincah dan manis yang spektakuler. Saya baru sekali ini melihatnya," kata seorang pengusaha Rusia menyampaikan kesannya.

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:
http://www.deplu.go.id
Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:
diplomasi_ri@yahoo.com

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110
Telepon : 021-3813480
Faksimili : 021-3513094